

ANALISIS FLYPAPER EFFECT PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL

Leonardus Julyano Sema

leonsema9@gmail.com

Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyzed and find out the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund on Capital Expenditure also phenomena of Flypaper Effect Of Local Governments of East Jawa Province during 2016-2019. While, the research was quantitative. Moreover, the population was Local Governments of East Jawa Province with 38 cities/districts as the sample. Furthermore, the observation period was started from 2016 until 2019. Additionally, the data were secondary, in the form of a Budget Realisation Report of East Jawa Provice. Meanwhile, the data collection technique used full sampling, which used all populations as the sample. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. For the research result, it concluded as follows: (a) Local-owned Source Revenue had a positive effect on Capital Expenditure; (b) General Allocation Fund had a positive effect on Capital Expenditure; (c) Specific Allocation Fund had a positive effect on Capital Expenditure; and (d) there was no Flypaper Effect of Cities/districts of Local Government of East Jawa Province during 2016-2019.

Keywords : flypaper effect, local-owned source revenue, general allocation fund, specific allocation fund, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal serta fenomena *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur dengan sampel penelitian yang terdiri atas 38 Kabupaten/Kota. Periode pengamatan sampel penelitian dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 38 Kabupaten/Kota yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan metode full sampling yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Kemudian tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016-2019.

Kata Kunci : *flypaper effect*, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi menjadi lembaran baru dalam perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia, ada sekian banyak perubahan yang tampak hingga saat ini. Perubahan-perubahan tersebut menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan bernegara baik itu secara politik, hukum, sosial, budaya, pendidikan, maupun ekonomi. Semuanya dituntut oleh seruan agenda reformasi yang identik dengan perombakan kembali secara total tatanan suatu sistem. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya

good governance, dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan (Mardiasmo, 2002a : 3). Sehingga hal tersebut menjanjikan masa depan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita tema sentral reformasi yang salah satunya adalah *good governance* akhirnya bermuara pada satu terobosan baru dalam birokrasi Indonesia yaitu penerapan sistem desentralisasi. Desentralisasi yang telah diterapkan dalam sistem birokrasi Indonesia sejak kejatuhan orde baru dapat dilihat dalam bentuk otonomi daerah. Tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Haryanto, 2008 : 2). Artinya, pemerintah dalam upaya pelaksanaan tugasnya diharapkan berorientasi pada pelayanan dan pendampingan masyarakat demi terwujudnya *bonum commune* (kesejahteraan bersama), dengan mengikutsertakan peran dari setiap elemen masyarakat dalam pengaplikasiannya. Intani (2018) menyatakan bahwa tujuan pemerintah daerah adalah untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, terealisasinya pembangunan dalam suatu daerah, tercapainya standar pelayanan minimum kepada masyarakat berupa tersedianya fasilitas saran dan prasarana publik sesuai dengan kebutuhan daerah, serta memberi kemudahan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bertolak dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa segala usaha pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah adalah pembangunan yang berorientasi pada pelayanan terhadap masyarakat.

Paramartha dan Budiasih (2016) menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan daerahnya dengan baik. Berdasarkan PP 105 tahun 2000, pemerintah daerah dapat mengatur pengelolaan keuangan daerahnya dengan harapan terjadinya keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan pengelolaan keuangannya sebaik mungkin. Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan dana daerah yang ada di dalamnya. Dana daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah dan dana perimbangan menjadi salah satu aset yang dikelola dalam keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang memiliki peranan penting dalam mengukur kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian suatu daerah (Ariwibowo, 2015). Sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah memiliki peran penting bagi daerah terutama dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pemerintahan. Namun, dewasa ini terdapat permasalahan yang menunjukkan ketimpangan pendapatan yang berbeda pada daerah-daerah di Indonesia. Daerah yang maju di bidang industri dan memiliki kekayaan sumber alam melimpah cenderung menghasilkan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya terbatas dan tingkat industri yang rendah. Hal ini mengharuskan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan transfer yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing (Sari, 2017). Kemudian, dalam UU No. 32 tahun 2004 dijelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, daerah otonom mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan kehadiran kedua dana tersebut pemerintah diharapkan mampu memanfaatkannya dengan secara efektif dan efisien, sehingga cita-cita pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keuangan suatu daerah ditentukan oleh potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan sumber-sumber daya tersebut berimplikasi pada ketimpangan perolehan

pendapatan asli antar daerah. Ketimpangan perolehan Pendapatan asli daerah ini akhirnya ikut mempengaruhi penyerapan dana transfer yang berbeda pada daerah-daerah tersebut. Daerah dengan potensi sumber daya rendah cenderung lebih banyak berharap pada dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber dana bagi pembiayaan daerah, dan tidak melakukan peningkatan potensi daerah yang menunjang pendapatan asli daerah. Respon daerah yang cenderung lebih besar terhadap dana transfer pemerintah pusat ketimbang memanfaatkan potensi asli daerahnya ini lebih dikenal sebagai fenomena yang disebut *Flypaper Effect*.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Paramartha dan Budiasih (2016) tentang analisis *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Khusus Pada Belanja Modal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dan Ketiganya berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal serta terjadi *Flypaper Effect*. Di sisi lain, penelitian lain yang dilakukan oleh Putri (2019) menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, ditambah lagi dengan DBH berpengaruh positif terhadap belanja daerah serta terjadi *Flypaper Effect*. Selanjutnya penelitian Wahyuni dan Supheni (2017) membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan, dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian, terjadi *Flypaper Effect* karena pengaruh DAU lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal serta apakah terjadi *Flypaper Effect* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Tahun 2016-2019.

Dari penjelasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1)Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (2)Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (3)Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal?, (4)Apakah terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ?. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal, (2) Untuk menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal, (3) Untuk menguji Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal, (4) Untuk menguji fenomena *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

LANDASAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang sangat tepat untuk menggambarkan hubungan antara publik atau masyarakat dengan pemerintah. Teori agensi dikenal sebagai teori yang menempatkan dua pihak yaitu *principal* dan *agent* dalam suatu hubungan yang korelatif. Seorang pemilik modal atau kekuasaan adalah prinsipal yang mendelegasikan kekuasaan dan modalnya kepada penerima kuasa dan modal yaitu agen. Menurut Mardiasmo (2002b: 20) kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) ini untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Adapun teori agensi bertujuan untuk meyelesaikan masalah (1) masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antara *principal* dan *agen* serta kesulitan prinsipal melakukan verifikasi pekerja *agen*, (2) masalah pembagian risiko yang muncul ketika prinsipal dan *agen* memiliki perilaku yang berbeda terhadap risiko. Masalah karena perbedaan tindakan karena adanya perbedaan preferensi risiko (Ikhsan dan Suprasto, 2008 :76).

Bertolak dari teori agensi di atas dapat dikonklusikan bahwa relasi antara pemerintah dan masyarakat dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan. Hubungan ini terjadi oleh

karena adanya ikatan yang ditetapkan oleh masyarakat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan menjadi pengawas atas langkah yang diambil oleh pemerintah dan menyesuaikan tujuan yang diinginkan masyarakat dengan tujuan pemerintah. Selain itu masyarakat dapat meminta bahkan menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah atas rancangan, penetapan, dan pengimplementasian anggaran serta kinerja yang sudah ditunjukkan oleh pemerintah apakah sudah efisien dan efektif sehingga dapat dinilai sejauh mana pemerintah telah berlaku dalam rangka kepentingan kesejahteraan rakyat.

Otonomi Daerah

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi sesungguhnya (Maimunah, 2006). Pemberlakuan otonomi daerah pada seluruh jajaran birokrasi di seluruh Provinsi Republik Indonesia kala itu, membuat pemerintah daerah menatap arah baru dalam membangun daerahnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan dan pemerataan potensi setiap daerah sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, kualitas dan kuantitas pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta pemberdayaan ruang publik untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar keuangan yang menjadi penyokong dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Pada birokrasi Indonesia, anggaran daerah dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD (Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Adapun struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, pengawasan, perencanaan, distribusi, alokasi, dan stabilisasi (PP No. 12 Tahun 2019). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Selain pendapatan daerah, APBD disusun atas komponen belanja yang merupakan perwujudan daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos yang menyusun belanja daerah yaitu pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, dan pos belanja lainnya. Kemudian terdapat pembiayaan daerah yang terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Belanja Modal

PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja. Dalam pandangan Halim (2004: 73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan

menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Kehadiran aset tetap oleh Pemerintah daerah merupakan hasil dari aktivitas belanja modal yang menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan pelayanan fisik kepada publik. Peningkatan kuantitas aset tetap ke dalam inventaris Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan adanya pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal yang terdapat dalam APBD. Pengalokasian anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik itu untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pemenuhan fasilitas publik, yang semuanya merujuk pada kepentingan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari penerimaan pajak bersumber dari dalam daerah yang berhubungan guna membiayai kegiatan daerah tersebut yang bersumber pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Saputri, 2020). Selain itu, menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah yang bersumber dari pajak maupun non pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan bukti dari kemandirian dan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensinya, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengimplementasikan tanggung jawabnya sebagai penguasa dan pengelola sumber-sumber daya tersebut. Dengan maksimalnya pemanfaatan potensi-potensi daerah sendiri, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada pusat dan secara tidak langsung menunjukkan kemandirian pembangunan. Selain itu, kurangnya ketergantungan pada bantuan pusat membuat daerah tersebut mengalirkan dana yang seharusnya diterima pada daerah yang lebih membutuhkan transfer dari pusat untuk memacu pembangunan daerahnya.

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

Kumorotomo (2005: 220) menyatakan bahwa secara konseptual, DAU dialokasikan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang secara sederhana dapat dirumuskan sebagai selisih antara kebutuhan fiskal dengan kemampuan fiskal dari setiap daerah. Dalam hal ini DAU berperan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi ketimpangan horizontal (*horizontal imbalance*) dalam keuangan antar daerah yang diakibatkan oleh kesenjangan PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Sesuai ketentuan UU No.25 tahun 1999 dan PP No.104 tahun 2000 tentang dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perhitungan DAU dilakukan berdasarkan pada formula *fiscal gap* dan beberapa faktor penyeimbang. PP No. 104 tahun 2000 selanjutnya direvisi dengan PP No.84 tahun 2001 yang menetapkan formula DAU sesuai dengan kesepakatan pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) pada bulan Agustus 2001. Berdasarkan kesepakatan ini, formula DAU dihitung dengan faktor-faktor yang relevan untuk menyeimbangkan keuangan antar daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dali *et al.*, (2018) dalam tulisannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu daerah membiayai kebutuhan tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Wijaya (2007), dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

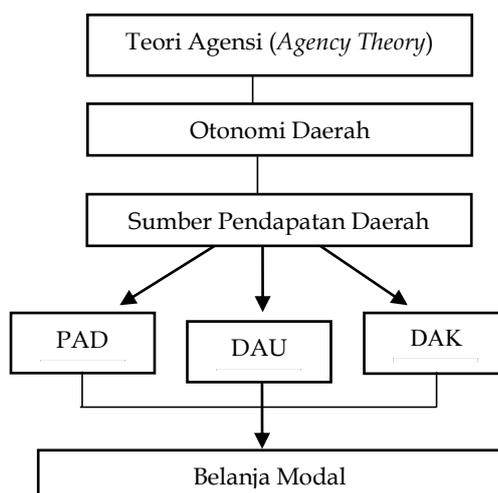
Flypaper Effect

Oates, 1999 (dalam Putri, 2019) menuliskan *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat suatu daerah memberikan respon belanja lebih besar terhadap dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri. Artinya pemerintah daerah lebih merespon secara positif alokasi belanja yang bersumber dari dana transfer pemerintah yang menunjukkan, dan kurang mengandalkan pendapatan asli daerahnya. Hal ini akhirnya menimbulkan kecenderungan untuk menunggu bantuan yang diberikan pusat dibandingkan dengan sumber dana hasil pengelolaan potensi daerah.

Ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak bersumber dari transfer/*grants* (DAU, DAK dan DBH) dibandingkan pendapatan asli dari daerahnya (PAD) sehingga dapat berakibat pemborosan dalam belanja daerah, maka hal itu menyebabkan terjadinya fenomena *Flypaper Effect* (Ekawarna, 2017). Dan hal ini sejalan dengan Turnbull (1998) yang menunjukkan bahwa indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan oleh adanya inefisiensi pada belanja pemerintah daerah.

Rerangka Konseptual

Mengacu pada tinjauan teori yang telah dijabarkan, maka dapat digambarkan rerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri, dan menjadi sumber penerimaan penting bagi suatu daerah dalam rangka membiayai belanja daerah serta membantu jalannya pembangunan. Daerah dengan pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan tingkat produktivitas daerah tersebut serta potensi sumber daya yang melimpah. Sehingga kemampuan pembiayaan daerahnya tinggi yang pada akhirnya menimbulkan kinerja keuangan yang positif. Artinya, pemerintah daerah

mampu memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki dan secara mandiri mengelola daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Berkaitan dengan pelayanan publik, alokasi belanja modal merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan meningkatkan produktivitas perekonomian daerah (Solikin dan Widiawaty, 2009). Paramartha dan Budiasih (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara itu, Dali *et al.*, (2018) membuktikan bahwa Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah bertambah, maka jumlah belanja daerah ikut mengalami peningkatan. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut.

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana alokasi umum bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sifatnya sebagai transfer tak bersyarat. Dana alokasi umum dalam peranannya sebagai pemerataan horizontal yang menutup celah fiskal yang berada di antara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah. Wahyuni dan Supheni (2017) menjelaskan bahwa 25 % dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Hasil penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian, Nurdini *et al.*, (2015) dalam *output* uji hipotesis diketahui bahwa secara parsial DAU berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah, yang bermakna bahwa semakin besar DAU maka semakin besar pula belanja daerah. Sedangkan Putri (2019) dalam penelitiannya membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis berikutnya adalah sebagai berikut.

H₂ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Otonomi daerah menandakan adanya pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah diberi kekuasaan dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, salah satunya urusan fiskal. Akan tetapi, walaupun demikian pemerintah daerah tetap memperoleh dana dari pemerintah pusat. Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Salah satunya adalah dana alokasi khusus (DAK). DAK bertujuan untuk mengurangi biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung pemerintah daerah. DAK membantu membiayai kegiatan yang khususnya untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau mendorong peningkatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur, dan prasarana pemerintah daerah (Darise, 2008: 137). Putri (2019) dalam penelitiannya membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Selain itu, penelitian Paramartha dan Budiasih (2016) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang ketiga adalah sebagai berikut.

H₃ : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Flypaper Effect

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan (DAU, DAK, dan Dana Bagi hasil) serta pendapatan lain-lain yang sah. Setiap daerah mempunyai penerimaan yang berbeda dan prioritas pembangunan yang berbeda juga. Dalam rangka menunjang pembangunan pemerintah daerah melakukan belanja

daerah. Dan salah satu jenis belanja daerah adalah belanja modal. Akan tetapi, terdapat fenomena berkaitan dengan alokasi dana untuk penganggaran belanja modal tersebut. Oates, 1999 (dalam Sukriy dan Halim, 2003) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku pemerintah daerah dalam merespon transfer pemerintah pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya, maka fenomena ini disebut sebagai *Flypaper Effect*. Berdasarkan penelitian Paramarhta dan Budiasih (2016) menunjukkan terjadinya *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013. Kemudian, Dali *et al.* (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan, Wahnyuni dan Supheni (2007) menghasilkan bukti yang menunjukkan terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. Yang artinya respon Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap Dana Alokasi Umum lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai semua pengeluarannya. Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis keempat adalah sebagai berikut.

H₄: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus lebih berpengaruh terhadap Belanja Modal daripada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2017: 23). Populasi adalah keseluruhan dari satuan-satuan individu yang memiliki karakter yang sama dan bersifat general (Sekaran dan Bougie, 2017: 35). Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota. Adapun objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *full sampling* dalam pengambilan sampel. Teknik *full sampling* merupakan teknik yang menggunakan seluruh populasi sebagai sampel karena terbatasnya jumlah populasi yang dapat disebut juga sebagai sampel sensus. Menurut Sugiyono (2017: 137) sampel sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Metode sensus adalah metode dengan mengambil sampel seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung. Adapun data sekunder tersebut diperoleh melalui metode dokumentasi. Liando (2017: 43) menyatakan data sekunder dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan, pengelompokan, pencatatan, perhitungan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD periode 2016-2019. Data sekunder ini diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri atas dua, yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Sedangkan variabel independen terdiri atas empat yaitu, fenomena *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab, karena terdapat perubahan variabel dependen. Di sisi lain variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena terdapat variabel bebas (Sugiyono, 2012: 64). Sugiyono (2012) menyatakan pada dasarnya variabel penelitian berisi suatu nilai dan sifat dari orang atau objek dari kegiatan yang bermacam-macam sehingga peneliti dapat mempelajari dan dapat menarik kesimpulannya.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Zulaihah (2019) menyatakan bahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dana alokasi umum membantu menutupi kekurangan kapasitas fiskal daerah terhadap kebutuhan fiskal. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah, akan tetapi tetap dalam prioritas nasional. Dana alokasi khusus diprioritaskan pada daerah-daerah yang memenuhi kriteria untuk memperoleh dana perimbangan tersebut. adapun kriteria tersebut meliputi kriteria umum, khusus, dan teknis.

Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan fenomena yang menunjukkan adanya respon yang berbeda terhadap dana transfer dan pendapatan asli daerah, yang mana pemerintah daerah memberikan respon positif terhadap transfer pemerintah dibandingkan pendapatan asli daerahnya dalam penganggaran belanja. Dalam penelitian ini, asumsi terjadinya *Flypaper Effect* berdasarkan pada perbandingan antara pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal. Maimunah (2006) menunjukkan syarat terjadinya *Flypaper Effect* adalah (a) apabila efek (nilai koefisien) dana transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja daerah lebih besar daripada efek (nilai koefisien) PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (b) PAD tidak signifikan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu unsur dari belanja daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset tetap. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja atas perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2017: 232) menyatakan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau *general*. Kemudian analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum mengenai objek yang diteliti oleh peneliti. Statistik deskriptif yang peneliti gunakan untuk mendeskripsikan suatu data, yang dapat menunjukkan hasil pengukuran rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*deviation standart*) serta maksimum-minimum.

Uji Asumsi Klasik

Peneliti sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, perlu melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik ini terdiri atas beberapa pengujian, yaitu :

Uji Normalitas

Nugroho (2005: 18) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Pendekatan Grafik, Salah satu cara termudah melihat normalitas data dengan melihat grafik, yaitu grafik normal *Probability Plot of Regression Standart*, dengan pengujian ini disyaratkan bahwa data normal jika penyebarannya sepanjang 45^o garis diagonal dan mengikuti garis diagonal antara 0 dari pertemuan sumbu X dan Y maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya. Pengujian normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Dasar pengambilan keputusan untuk menentukan normalitas data adalah sebagai berikut : (a) Data dikatakan normal jika *Asymp. Sig* > 0,05. (2) Data dikatakan tidak normal jika *Asymp* < 0,05. Tidak terpenuhinya normalitas pada yang diuji disebabkan oleh data yang tidak normal karena terdapat nilai yang terlalu ekstrem pada data yang diambil untuk diuji (Ghozali, 2018: 30).

Uji Multikolinieritas

Ghozali (2018: 107) menyatakan bahwa uji multikolinieritas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Menurut Ghozali (2018 : 108) menyatakan cara mendeteksi ada dan tidaknya gejala multikolinieritas adalah apabila nilai *Variance Inflation Factor*(VIF) < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10 , maka tidak terjadi multikolinieritas. Namun, apabila nilai VIF > 10 atau nilai *tolerance* < 0,10 , maka terjadi multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2018 : 111). Autokorelasi dapat diuji dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson. Jika nilai Durbin-Watson berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi (Nugroho, 2005). Kemudian apabila nilai D-W < -2, maka terjadi autokorelasi positif sedangkan jika nilai D-W > 2 terjadi autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghozali (2018 : 142) menjelaskan cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat diketahui melalui pola gambar *scatterplot*, prediksi variabel independen (ZPRED) dengan variabel residualnya (SRESID). Analisis pada pola gambar *scatterplot* dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas, jika: (a) titik-titik dapat menyebar di atas dan di bawah sekitar angka 0, (b) titik-titik penyebarannya tidak boleh membentuk pola pada satu tempat tertentu yang membentuk gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Selain menggunakan pola gambar *scatterplot*, cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dilakukan dengan memanfaatkan uji glejser. Uji glejser yaitu uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan uji glejser adalah : (a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi heteroskedastisitas, (b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Sekaran (1992) menjelaskan bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hubungan antara kedua variabel yaitu independen dan dependen dalam penelitian ini dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + e$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

β : Slope atau koefisien regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

e : Standar error

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2018) menyatakan suatu koefisien determinasi yang dapat mengukur seberapa jauh kemampuan persentase semua variabel terhadap variabel dependen disebut sebagai koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018: 97).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F memiliki tujuan yaitu menunjukkan apakah variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen jika digabungkan dalam model regresi. Ghazali (2018: 98) menunjukkan langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan Uji F dengan kriteria sebagai berikut: (a) Jika nilai probabilitas ($sign < 0,05$) maka, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. (b) Jika nilai probabilitas ($sign > 0,05$) maka, H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya semua variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Regresi linier berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel independen dalam penelitian, maka digunakan metode analisis berganda untuk melihat pengaruh hubungan antara variabel dependen dengan independennya (Ghozali, 2018). Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pengujian. Apabila nilai signifikan menyatakan $< 0,05$, maka dapat dikatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen secara individu. Sedangkan, di sisi lain jika nilai signifikan $> 0,05$, maka dapat dikatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen secara individu. Pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai hipotesis ketiga. Pengujian hipotesis keempat menggunakan cara yang berbeda. Pengujian hipotesis keempat dilakukan dengan cara yaitu (a) apabila nilai koefisien DAU, DAK, DBH terhadap belanja daerah $>$ nilai koefisien PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau PAD tidak signifikan maka terjadi *Flypaper Effect* (Maimunah, 2006).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan gambaran mengenai data penelitian yang telah diolah, sehingga dapat diketahui jumlah data yang diolah (N), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-ratanya (*mean*), serta standar deviasi (*standard deviation*) pada variabel independen dan dependen dalam penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif yang dilakukan meliputi variabel independen yang terdiri atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta ada variabel dependen yaitu Belanja Modal (BM). Adapun hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan melalui Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
PAD	143	20306230730.85	5381857154267.47	440989573277.9923	783655370941.97770
DAU	143	5223421321.00	1765927493000.00	933300847507.4324	330765901204.81976
DAK	143	51800475992.00	994460684000.00	279583154011.2377	134827779016.20126
BM	143	114677681074.27	2754304824082.00	426478926186.2948	368247862820.71570
Valid N (listwise)	143				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 1 ditunjukkan hasil dari analisis statistik deskriptif yaitu nilai *minimum-maximum*, *mean*, dan *deviation standart* dari setiap variabel baik itu independen dan dependen. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah ditunjukkan nilai *minimum* sebesar Rp 20.306.230.730,85 dan nilai *maximum* sebesar Rp 5.381.857.154.26747. Kemudian *mean* atau rata-rata Pendapatan Asli Daerah yaitu sejumlah Rp 440.989.573.277,99 sedangkan standar deviasinya sebesar Rp 783.655.370.941,97. Nilai *minimum* untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan angka sebesar Rp 5.223.421.321 dan nilai *maximum* DAU sebesar Rp 1.765.927.493.000. Nilai *mean* dan standar deviasi DAU masing-masing sebesar Rp 933.300.847.507,43 dan Rp 330.765.901.204,81. Pada variabel Dana Alokasi Khusus nilai *minimum* sebesar Rp 51.800.475.992 dan nilai *maximum* DAK terdapat sebesar Rp 994.460.684.000. Adapun nilai *mean* dan standar deviasi DAK adalah Rp 279.583.154.011,23 dan Rp 368.247.862.820,71. Pada variabel Belanja Modal sebagai variabel dependen nilai *minimum*-nya sebesar Rp 114.677.681.074,27 dan nilai *maximum* diperoleh sebesar Rp 2.754.304.824.082. Nilai *mean* sebesar Rp 426.478.926.186,29 dan standar deviasinya adalah Rp 368.247.862.820, 71.

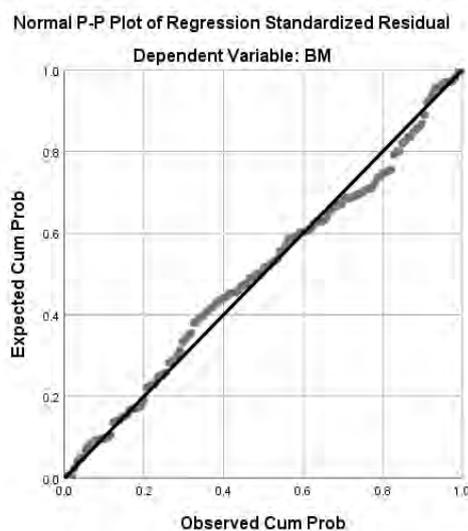
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas data merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui persebaran data dari setiap variabel dalam suatu penelitian. Normal atau tidaknya persebaran data tersebut dapat diketahui melalui dua cara, yaitu pendekatan analisis grafik *normal probability plot* dan *Kolmogrov-Smirnov test*. Berikut penjabaran hasil dari dua pendekatan uji normalitas data:

Uji Normalitas Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Grafik *Normal Probability Plot*

Uji normalitas data dengan menggunakan pendekatan grafik merupakan uji normalitas yang memanfaatkan grafik *normal probability plot* untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak. Syarat normalnya persebaran data dengan menggunakan pendekatan ini dilihat dari penyebaran data yang terjadi sepanjang 45° garis diagonal dan mengikuti garis diagonal antara 0 dari pertemuan sumbu X dan Y. Berikut ini hasil dari uji menggunakan pendekatan grafik *probability plot* yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2

Grafik *Probability Plot Of Regression Standart*
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan grafik pada Gambar 2 di atas ditunjukkan bahwa data yang berupa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Ini artinya data yang digunakan menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sehingga dari grafik *Probability Plot* tersebut peneliti membuktikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat pendekatan grafik dan dapat digunakan dalam suatu model regresi.

Uji Normalitas Dengan Menggunakan Pendekatan *Kolmogrov-Smirnov Test*

Uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dapat diketahui melalui syarat berikut : (a) data dikatakan normal jika $Asymp. Sig > 0,05$, (b) data dikatakan tidak normal jika $Asymp < 0,05$. Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka peneliti mengolah data yang ada dan hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* ditunjukkan melalui Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandartdized Residual
N		143
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0001111
	Std. Deviation	102046479714.02600000
	Absolute	.067
Most Extreme Differences	Positive	.067
	Negative	-.057
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Dari hasil pengujian yang disajikan melalui Tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa dari jumlah sampel sebanyak 143 sampel diperoleh nilai *test statistic* sebesar 0.067 dengan *Asymp. Sig (2-tailed)* 0.200. Bertolak dari hasil pengujian tersebut maka diketahui bahwa data penelitian berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* memenuhi syarat normalnya distribusi data, yaitu *Asymp. Sig* > 0,05.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen (bebas). Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 serta nilai VIF lebih dari 1 serta tidak lebih dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi. Untuk membuktikan apakah variabel-variabel yang digunakan mengalami multikolinieritas atau tidak, maka peneliti menyajikan hasil dari uji multikolinieritas yang ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

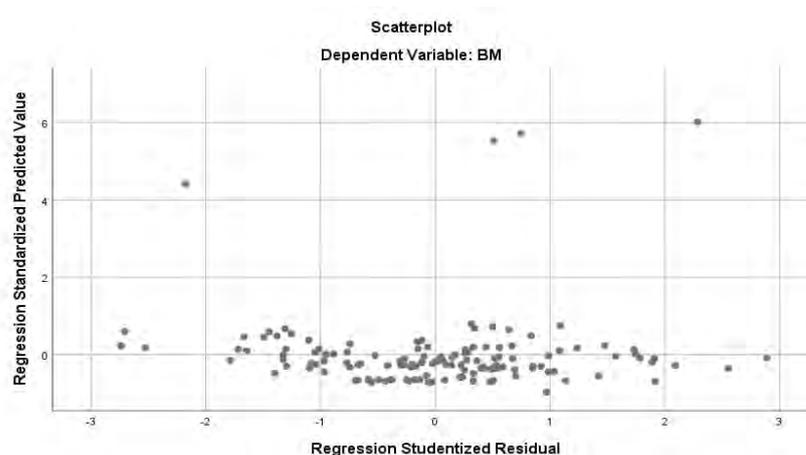
Model		Collinerarity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Cosntant)		
	PAD	.920	1.086
	DAU	.473	2.114
	DAK	.492	2.033

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3 di atas, diketahui bahwa Variabel PAD menghasilkan nilai *Tolerance* sebesar 0,920 dengan nilai VIF 1,086. Variabel DAU memperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,473 dengan nilai VIF 2,114. Sedangkan variabel DAK mendapatkan nilai *Tolerance* sebesar 0,492 dengan nilai VIF 2,033. Dari hasil nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* ketiga variabel independen tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yang menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas. Hal ini dikarenakan nilai *Tolerance* dan VIF dari ketiga variabel independen tersebut memenuhi syarat yaitu nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang memiliki tujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* atau perbedaan *variance* dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Homoskedastisitas atau tidak terjadinya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui pola grafik *scatterplot* yang ditunjukkan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3
Grafik Scatterplot

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan pola grafik *scatterplot* pada Gambar 3, analisis pada pola grafik *scatterplot* menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas. Dari grafik *Scatterplot* tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah sekitar angka 0, kemudian penyebaran titik-titik pada grafik tidak membentuk pola pada satu tempat tertentu yang membentuk gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Selain analisis pola grafik *Scatterplot*, cara mendeteksi gejala heteroskedastisitas pada suatu model regresi dapat dilakukan melalui uji glejser. Berikut pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Sig.	Keterangan
1 PAD	0,058	Bebas Heteroskedastisitas
DAU	0,667	Bebas Heteroskedastisitas
DAK	0,586	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian uji glejser yang ditunjukkan pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK menghasilkan nilai signifikansi yang berbeda-beda. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,058, Dana Alokasi Umum dengan nilai signifikansi 0,667, dan Dana Alokasi Khusus dengan nilai signifikansi 0,586. Nilai signifikansi yang dihasilkan oleh ketiga variabel independen tersebut menunjukkan bahwa ketiganya memiliki nilai signifikansi > 0,05. Hal ini menyimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi linier terjadi korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Pengujian autokorelasi pada sebuah model regresi dapat ditunjukkan melalui uji statistik Durbin-Watson. Hasil pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson disajikan dalam Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,336

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1,336. Syarat terjadinya autokorelasi ditunjukkan oleh nilai Durbin-Watson berada diantara -2 sampai +2 dan apabila nilai D-W < -2, maka terjadi autokorelasi positif sedangkan jika nilai D-W > 2 terjadi autokorelasi negatif. Bertolak dari syarat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami autokorelasi karena nilai Durbin-Watson yang dihasilkan $-2 < 1,336 < 2$.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda akan menunjukkan arah dan mengukur kekuatan hubungan pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal sebagai variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	46431016814,224	25997747341,29		1,786	0,076
PAD	0,417	0,012	0,888	36,228	0,000
DAU	0,116	0,038	0,105	3,060	0,003
DAK	0,313	0,092	0,115	3,419	0,001

a Dependent Variable : BM

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda yang ditunjukkan pada Tabel 6, maka dapat diketahui model persamaan regresi sebagai berikut :

$$BM = 46431016814,224 + 0,417PAD + 0,116DAU + 0,313DAK + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Berikut ini ditunjukkan hasil dari Uji koefisien determinasi pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.961 ^a	0.923	0.922

a. Predictors : (Constant), PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable : BM

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,923. Nilai koefisien determinasi (R²) yang bernilai 0,923 ini artinya terdapat 92,3 % kontribusi yang diberikan oleh ketiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perubahan yang dialami oleh Variabel dependen atau Belanja Modal. Sementara sisanya sebesar 7,7 % merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

Uji F

Uji *goodness of fit* (uji kelayakan model) merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur ketepatan regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Uji kelayakan model dapat dilakukan melalui pengukuran nilai statistik F yang menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil dari Uji F disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8
Uji F
ANOVA^a

Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,78E+25	3	5,93E+24	557.029	.000 ^b
	Residual	1,48E+24	139	1,06E+22		
	Total	1,93E+25	142			

a Dependent Variable : BM

b Predictors : (Constant), PAD, DAU, DAK

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji F yang ditunjukkan pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa F_{Hitung} senilai 556,029 dan tingkat signifikannya sebesar 0,000 yang artinya signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model penelitian baik dan layak untuk digunakan serta dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis ini dapat diketahui melalui uji t yang ditunjukkan melalui Tabel 9 berikut.

Tabel 9
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardize Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	46431016814.224	25997747341.290	.	1.786	.076
PAD	.417	.012	.888	36,228	0,000
DAU	.116	.038	.105	3.095	0,003
DAK	.313	.092	.115	3,419	0,001

a Dependent Variable : BM

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 9, maka dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t_{Hitung} sebesar 36,228 dan nilai signifikansinya senilai 0,000 yang artinya signifikansinya kurang dari 0,05. Artinya, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dan signifikan, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 9, maka dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki t_{Hitung} 3,060 dengan nilai

signifikansi sebesar 0,003. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini membuat hipotesis kedua penelitian ini dapat diterima.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 9, maka dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki t_{hitung} sebesar 3,419 dengan nilai signifikan 0,001 yang artinya Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini juga menyimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 9, maka dari hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,417, Dana Alokasi Umum 0,116, dan Dana Alokasi Khusus 0,313. Dari ketiga nilai koefisien yang diperoleh dari uji t dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien PAD lebih besar dari DAU dan DAK, yang artinya tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019. Jadi, Hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas dapat diketahui bahwa Hipotesis pertama (H_1), yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dapat diterima. Terbuktinya hipotesis tersebut mengartikan bahwa dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota akan ikut memberikan kontribusi bagi penambahan Belanja Modal daerah tersebut. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah ini merupakan bukti bahwa kemandirian dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan ditentukan salah satunya oleh potensi-potensi yang berasal dari daerahnya. Hasil yang ditunjukkan oleh pengujian hipotesis pertama ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramartha dan Budiasih (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Dali *et al.*, (2018) juga ikut mendukung hasil penelitian ini dengan hasil penelitannya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil hipotesis dapat diketahui bahwa hipotesis kedua (H_2) dapat diterima, yang artinya Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal ini menunjukkan bahwa DAU sebagai dana yang bersumber dari APBN ikut berkontribusi dalam mengisi pos pembiayaan Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan kepada suatu daerah, maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan juga. Akan tetapi, di sisi lain peningkatan DAU menunjukkan tingginya ketergantungan suatu daerah terhadap dana transfer dan merepresentasikan ketidakmandirian suatu daerah dalam membiayai daerahnya. Sebaliknya, semakin kecil DAU yang diterima oleh suatu daerah menandakan bahwa semakin kecilnya ketergantungan daerah tersebut terhadap bantuan dari pusat dan meningkatkan kemandirian daerah dari potensinya sendiri. Hasil penelitian lain yang mendukung penelitian ini yaitu hasil penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) dan Putri (2019) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Nurdini *et al.*, (2018) yang menyatakan bahwa secara parsial DAU bermakna secara positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ada, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif Terhadap Belanja Modal dapat diterima. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian

suatu belanja modal. Dana alokasi khusus sebagai dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat memiliki peranan dalam membantu pemerintah daerah untuk memenuhi biaya kegiatan khusus yang ada di daerah tersebut. DAK memberikan kontribusi bagi pembiayaan fasilitas daerah yang mengalami ketertinggalan agar mengurangi kesenjangan antar daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Paramartha dan Budiasih (2016) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Flypaper Effect

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hipotesis keempat (H_4) tidak diterima karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak lebih berpengaruh terhadap Belanja Modal dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai koefisien PAD yang lebih besar dari DAU dan DAK menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang lebih dominan terhadap pembiayaan Belanja Modal daripada kedua dana transfer tersebut. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* yang merepresentasikan tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Paramartha dan Budiasih (2016) yang menunjukkan terjadinya *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2013. Hasil Penelitian ini juga bertolak belakang dengan Dali *et al.*(2018) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa *Flypaper Effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan, Wahnyuni dan Supheni (2007) menghasilkan bukti yang menunjukkan terjadi *Flypaper Effect* pada belanja daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat simpulan-simpulan yang ditarik dari hasil pengujian tersebut. adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut, yaitu : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli suatu daerah akan memberikan kontribusi positif bagi anggaran belanja modalnya dan sebaliknya. Artinya, PAD yang mengalami peningkatan mengakibatkan penambahan belanja modal, sedangkan berkurangnya PAD membuat belanja modal juga berkurang. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa penambahan dan pengurangan alokasi DAU terhadap suatu daerah akan berakibat pada Belanja Modal daerah. Semakin banyak DAU yang diberikan kepada daerah, maka Belanja Modal mengalami peningkatan, di sisi lain pengurangan DAU mengurangi Belanja Modal. (3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal menunjukkan bahwa penambahan Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan Belanja Modal. Hal ini juga menunjukkan pengurangan Dana Alokasi Khusus akan mengurangi Belanja Modal. (4) Tidak terjadi *Flypaper Effect* Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2016-2019. Berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai koefisien PAD lebih besar dibandingkan nilai koefisien DAU dan DAK, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2019. Hal ini mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam pengalokasian Belanja Modal. Hal ini juga menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut cenderung mengandalkan potensi-potensi daerah

sendiri dalam pengelolaan dan pembangunan, daripada mengharapkan secara lebih bantuan dana dari Pemerintah Pusat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal dan keterbatasan penelitian yang ada, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu: (1) Bagi Pemerintah, peneliti berharap pemerintah tetap mengandalkan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Belanja daerahnya. Pemerintah diharapkan meningkatkan potensi-potensi daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga ketergantungan daerah terhadap dana transfer Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dengan adanya kecendrungan untuk memanfaatkan penerimaan daerah daripada bantuan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah menjadikan daerah lebih mandiri dalam membangun dan mengelola daerah. (2) Bagi Masyarakat, Peneliti berharap bagi setiap wajib pajak yang terdapat di tengah masyarakat daerah untuk taat dan disiplin dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sangat ditentukan oleh retribusi dan pajak-pajak daerah, oleh karena itu masyarakat memiliki peran penting dalam mendongkrak pemasukan daerah yang nantinya berpengaruh bagi pembiayaan pembangunan daerah. (3) Bagi Peneliti, Penelitian berikutnya disarankan untuk menggunakan variabel-variabel baru dalam penelitiannya seperti adanya penambahan variabel Dana Bagi hasil dan Belanja Daerah sehingga terdapat pengembangan dari penelitian ini. Peneliti juga menyarankan penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan lain dengan menggunakan kuesioner, sehingga penelitian berikutnya dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh dari aspek perilaku Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber daya daerah, serta mengamati efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang dapat menjadi penyebab dari fenomena *Flypaper Effect*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, T. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 11(Edisi Khusus Desember 2015): 335-344.
- Dali, N., Erwin H., dan M. Irsyad. 2018. Pengaruh *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(2).
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Ekawarna, S.U. 2017. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4(3): 167-184.
- Ghozali, I.2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2014. *Manajemen Keuangan Sektro Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Haryanto. 2008. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Badan Penerbit. Semarang.
- Ikhsan, A., dan H.B Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Intani, R. 2018. Pengaruh Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

- Karo-karo, S. S. 2006. Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. *Tesis*. Program Magister Sains Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa Transisi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kusumadewi, D. A dan A. Rahman. 2007. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *JAAI* 11(1) : 67-80.
- Liando, I. E. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, *Flypaper Effect* dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Maimunah, M. 2006. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Ilmiah Padang. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*: 1-27.
- Mardiasmo. 2002a. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2002b. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nugroho, A. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistic Penelitian Dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.
- Nurdini, R., A. Wiratno., dan Y. N Farida. 2015. Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAKA)* 2(1) : 80-94.
- Paramartha, M. F dan I. G. A. N. Budiasih. 2016. Analisis *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15(2): 1536-1564.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 6 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322. Jakarta.
- Putri, Z. M. 2019. *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 9(1).
- Saputri, S. H. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (9)1.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Sekaran, U. 1992. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Empat, Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran dan R. Bougie. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Keenam. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukriy, A., dan A. Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI Yogyakarta* : 1140-1159.
- Solikin, I., dan Widiawaty. 2009. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI* 1(2): 165-177.

- Turnbull, G. K. 1998. The Overspending and *Flypaper Effects* of Fiscal Illusion : Theory and Empirical Evidence. *Journal of Urban Economics* 44(1): 1-26.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Wahyuni, S. E dan I. Supheni. 2017. *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Periode 2012-2016. *Akuntansi Dewantara* 1(2): 188-200.
- Wijaya, H.A.W. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Zulaihah, S. 2019. Pengaruh Pendapatan Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(12).